

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG DISPENSASI NIKAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung,
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh:

ANNISA RAHMADANI

NPM : 1621010222

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung,
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
dalam Ilmu Hukum Syariah**

Oleh:

ANNISA RAHMADANI

NPM : 1621010222

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2020M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini: **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pandangan dari seorang atau banyak orang akan hal atau peristiwa yang didapat atau diterima.¹

Persepsi menurut Bimo Walgito ialah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.²

2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³

¹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1146.

²Bimo Walgito, *Suatu Pengantar Psikologi Sosial* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2000), h. 54.

³Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Edisi Keempat Balai Pustaka, 2008), h. 885.

3. Dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁴
4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan dan tinjauan dalam keadaan sekarang maupun yang akan datang.⁵
5. Hukum Islam adalah pembicaraan Syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, yang berupa tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan.⁶
6. Jatimulyo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.⁷

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi ini:

⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Jakarta, 2019, h.5.

⁵Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 21.

⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Daar Al-Qalam, 1984), h. 74.

1. Secara Objektif

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang kedua pasangan mencapai umur yang cukup. Namun ketika kedua pihak tidak mencapai umur yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum Islam tidak membahas secara spesifik tentang usia perkawinan. Begitu seorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Hal ini membuat penulis ingin meneliti tentang persepsi masyarakat tentang dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung, Kab. Lampung Selatan.

2. Secara Subjektif

- a. Tersedianya literatur terkait yang mendukung judul penelitian.
- b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang persepsi masyarakat tentang dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, sehingga saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung

makna dan nilai ibadah. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.⁸

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.⁹

Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt terhadap hamba-Nya, di antara firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 53.

⁹ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.¹⁰

Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda belia (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki belum mencapai 19 tahun dan usia perempuan belum mencapai 16 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹¹

Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslaha mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya yang *Ijtihad*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16

¹⁰Abdul Aziz Abdul Rauf, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 354.

¹¹*Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999)

tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹²

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan mampu fisik bagi perempuan berusia 16 tahun. Menurut pengalaman perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 tahun karena pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan, karena suami dalam Islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak keturunannya.

Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan di usia dini. Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga

¹²Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 78.

bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.

Suatu pernikahan adalah hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, di dalamnya terdapat hikmah antara lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan mencegah orang berbuat maksiat. Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, ukurannya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan standar suatu perkawinan, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.

Pada Desa Jatimulyo terdapat 3 kasus yang pernikahannya tidak dicatatkan, mereka masih sama-sama berada di bangku SMP. Pernikahan anak di bawah umur tersebut terjadi akibat beberapa faktor dan kasus yang paling banyak adalah karena pergaulan bebas. Akibat pergaulan yang terlalu bebas si perempuan hamil dan kedua orangtua sepakat untuk segera menikahkan mereka sebelum anak yang dikandung lahir. Dalam pandangan masyarakat, hamil diluar nikah merupakan hal yang sangat tabu dilakukan dan dibicarakan. Namun apabila hal tersebut sudah terjadi, kebanyakan masyarakat di Desa Jatimulyo menikahkan kedua calon mempelai secara agama atau disebut juga nikah siri. Setelah kedua calon mempelai sudah mencapai batas usia yang telah ditetapkan, baru kemudian mereka dinikahkan secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun,

hal ini tidak disarankan karena selama menunggu untuk mencapai batas usia yang telah ditentukan banyak hal yang bisa saja terjadi. Kondisi psikologis dan mental yang belum siap mengarungi kehidupan rumah tangga tentu dapat memicu banyak masalah. Suami rentan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila mereka melangsungkan pernikahan secara siri akan merugikan pihak istri apabila sewaktu-waktu suami tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Begitu seseorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang isteri. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dlm masyarakat, yaitu hamil sebelum nikah. Timbullah anak zina lalu orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan, sehingga kadang-kadang ketika pengantin duduk bersanding, perut anak tersebut kelihatan sudah besar. Namun bagaimana jika pernikahan tersebut dilakukan oleh calon mempelai yang belum cukup umur menurut UU Perkawinan.

Dari uraian latar belakang di atas penulis bermaksud meneliti mengenai persepsi masyarakat tentang dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, adapun hasil tersebut akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah

Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan).

D. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *reserach* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada persepsi masyarakat tentang dispensasi nikah yang beralamatkan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.¹³

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan tentang dispensasi nikah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan tentang dispensasi nikah?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹³Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95

- a) Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan tentang dispensasi nikah.
- b) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan tentang dispensasi nikah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan *khazanah* ilmu bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah.
- b) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang persepsi masyarakat tentang dispensasi nikah di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam

terhadap praktik poligami, dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keIslaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga (Konsentrasi Ilmu Hukum), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan¹⁴. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Penerbit Mandar Maju 2005), h. 32.

subyek yang diteliti dari masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Alquran, *hadīts*, kitab-kitab fikih, buku-buku dan literature yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan yaitu tempat masyarakat yang akan diteliti oleh peneliti yang terdiri dari 15.695 jiwa.

b) Sampel

Sampel adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, yaitu dengan menentukan anggota sampel dengan *probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan beberapa daerah terkunci.¹⁶ Sehingga berdasarkan *sampling* di atas peneliti memilih sampel secara acak atau bebas dalam penelitian ini yaitu 1 Kepala KUA, 1 Tokoh Agama, 2 Tokoh Masyarakat (RT dan RW), 3 pemuda, dan 3 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur sehingga sampel yang diambil berjumlah 10 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Penelitian lapangan ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu wawancara merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.215.

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 148

terwawancara.¹⁷ Pada saat melakukan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang penulis butuhkan, dan yang penulis wawancarai antara lain masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya. Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:¹⁸

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

¹⁷Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 126.

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

b. Penandaan Data (*Cording*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku *literature*, Perundang-undangan, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut:

Metode berpikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus. Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang khusus kepada pemikiran yang umum, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.¹⁹ Menurut bahasa, nikah berarti pencampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.²⁰

Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

²⁰ Hafish Dasuki, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 32.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²¹ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawina tersebut. Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.²² Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zariat ayat 49

²¹Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, h.14.

²²Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.1.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²³

Perkawinan, yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:²⁴

- a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling benar.
- b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.
- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara

²³Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 522.

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.558-559.

langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.”

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fi 'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*talabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.²⁵

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.²⁶

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari

²⁵*Ibid*, h.57.

²⁶Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.8.

perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

- b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
- e. Nikah makruh. Pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh yang belum mampu memberi nafkah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnyanya.

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a. Pengertian Rukun, Syarat, dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.²⁷ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁸

b. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:²⁹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

²⁷Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 45-46.

²⁸*Ibid*, h.75.

²⁹Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.64.

- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) *Sighāt* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Pendapat lain tentang rukun nikah adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara *syar'i* untuk menikah. Di antara perkara *syar'i* yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan atau wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahnya seorang muslimah.
- b) Adanya akad, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan wali mengatakan, “*Zawwajyujuka Fulanah*” (“Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”).
- c) Adanya kabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “*Qabilu Hadzan*

³⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.13.

Nikah” atau “*Qabiltu Hadzat Tazwij*” (Aku terima pernikahan ini).

Dalam ijab dan kabul dipakai lafadz *inkah* dan *tazwij* karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan kamu dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.³¹

Dan firman Allah Swt. Q.S An-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).³²

³¹Abdul Aziz Abdul Rauf, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 423.

³²*Ibid*, h.81.

Lafadz tazwij dan *lafadz* nikah. Namun penyebutan dua *lafadz* ini dalam Al-Qur'an bukanlah sebagai pembatasan, yakni harus memakai *lafadz* ini dan tidak boleh *lafadz* yang lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, demikian pula murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu, memilih pendapat yang menyatakan akad nikah bisa terjadi dengan *lafadz* apa saja yang menunjukan ke sana, tanpa pembatasan harus dengan *lafadz* tertentu. Bahkan bisa dengan menggunakan bahasa apa saja, selama yang diinginkan dengan *lafadz* tersebut adalah penetapan akad. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan salah satu perkataan dari mazhab Ahmad. Akad nikah seorang yang bisu tuli bisa dilakukan dengan menuliskan ijab qabul atau dengan isyarat yang dapat dipahami.³³

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat beberapa pendapat berikut ini:³⁴

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan,
- b) Mahar (mas kawin),
- c) Calon pengantin laki-laki,
- d) Calon pengantin perempuan,
- e) *Sighāt* akad nikah.

³³“Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al-Quran dan As Sunnah” (On-Line), tersedia di: <http://asysyariah.com>. html (09 Juni 2020).

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h.45.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki,
- b) Calon pengantin perempuan,
- c) Wali,
- d) Dua orang saksi,
- e) *Sighāt* akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Menurut Hambali rukun nikah ada tiga macam:

- a) Calon mempelai (suami dan istri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram,
- b) Ijab,
- c) Qobul.

Sedangkan menurut golongan yang lain seperti Wahbah Zuhayli rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) *Sighāt* (ijab dan kabul),
- b) Calon pengantin perempuan,
- c) Calon pengantin laki-laki,
- d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin

perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.³⁵

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
 - b) Adanya wali,
 - c) Adanya dua orang saksi,
 - d) Dilakukan dengan *sighāt* tertentu.
- c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:³⁶

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawinkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat kedua mempelai

(1) Syarat-syarat pengantin pria

³⁵*Ibid*, h.47.

³⁶*Ibid*, h.49.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan *ijtihād* para ulama, yaitu:

- (a) Calon suami beragama Islam
 - (b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - (c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - (d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 - (e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
 - (f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 - (g) Tidak sedang melakukan ihram.
 - (h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - (i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- (2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan
- (a) Beragama Islam atau ahli kitab.
 - (b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
 - (c) Wanita itu tentu orangnya.
 - (d) Halal bagi calon suami.
 - (e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.

(f) Tidak dipaksa/ikhtiyar.

(g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b) Syarat-syarat ijab kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah *baligh* dan berakal dan boleh sebaliknya.³⁷

c) Syarat-syarat wali

(a) Laki-laki;

(b) Baligh;

(c) Waras akalnya;

(d) Tidak dipaksa;

(e) Adil; dan

(f) Tidak sedang ihram.

d) Syarat-syarat saksi

(a) Laki-laki;

(b) *Baligh*;

³⁷*Ibid*, h.57.

- (c) Waras akalnya;
- (d) Adil;
- (e) Dapat mendengar dan melihat;
- (f) Bebas tidak dipaksa;
- (g) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan;
- (h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

4. Prinsip-prinsip Perkawinan

Adanya beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:³⁸

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu *batal* dan *fasîd*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

b. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiar* (tidak

³⁸*Ibid*, h.23.

dipaksa). Pihak yang dilangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khithbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.

d. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga

Dalam Hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan pernikahan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai *mukallaf*, tetapi dalam pernikahan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, di samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan prinsip-prinsip atau asas perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umumnya, yaitu:³⁹

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya maka seorang suami dapat beristri lebih dari seoranghal itu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h.34.

bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka Undang-undang menentukan batas untuk menikah bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka Undang-undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Dari uraian prinsip dan asas dalam perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang perkawinan dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsip.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Di samping itu secara rinci tujuan pernikahan juga meliputi beberapa hal berikut ini:⁴¹

a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah akad nikah. Nafsu seks merupakan merupakan nafsu paling kuat pada diri manusia ia menuntut penyaluan.

b. Membentengi Akhlak yang luhur

Sasaran Utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.

⁴⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h.288.

⁴¹Drs. Abdul Aziz, *Buku Dasar Fiqh Munakahat* (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014), h.73.

c. Menegakkan Rumah Tangga Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah.

d. Meningkatkan ibadah kepada Allah

Menurut konsep Islam hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

e. Memperoleh Keturunan yang Shalih

Tujuan Pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan shalih untuk melestarikan dan mengembangkan bani adam.

6. Hikmah Perkawinan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:⁴²

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h.39.

- a. Memelihara *gen* manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan *gen* manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.

7. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan. Kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang melaksanakan seperti ini.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-urutannya sebagai berikut:⁴³

a. Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h.124-128.

memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya. Sesuai pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan atau tulisan.

Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

b. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai

pencatat perkawinan. Sesuai Pasal 6 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-tama diteliti pejabat tersebut.

Selain itu berdasarkan ayat (2), pegawai pencatat perkawinan juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- 2) Penelitian terhadap surat yang menyangkut kelahiran merupakan bagian yang penting, untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan dengan batas minimum umur yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.
- 3) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

- 4) Izin tertulis pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
- 5) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- 6) Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan.
- 7) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- 8) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HAMKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan dalam Pasal 6 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

c. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut Pasal 9 PP tersebut adalah:

- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.
- 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Adapun pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan

maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

d. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan.

Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, Pasal 10 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, supaya sah.

Peraturan pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selain menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan di tanda tangani pula oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadirinya. Dalam pasal 11 ayat (2) PP.No. 9 tahun 1957 juga ditentukan, bagi yang melangsungkan perkawinan

menurut agama Islam, akta perkawinan ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta perkawinan tersebut di buat rangkap dua, untuk helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, kemudian untuk helai kedua disimpan penitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Meskipun demikian untuk pelaksanaan perkawinan saja tampaknya keharusan hadir secara fisik bukan suatu hal yang mutlak, karena baik Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 hanya menunjuk pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Tidak dibicarakan secara tegas mengenai masalah ketidakhadiran jika ada calon mempelai yang berhalangan untuk datang dihadapan pegawai pencatat perkawinan.

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Nikah ialah akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan:

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁴⁴

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 menyatakan: Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Raihan Rosyid dalam karyanya, *Hukum Acara Peradilan Agama* menulis, Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun sedangkan mereka ingin menikah dan untuk menikah diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.⁴⁵

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban; di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah: tindakan pemerintah yang

⁴⁴Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Jakarta, 2008, h.72.

⁴⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 2008), h.32.

menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.⁴⁶

K. Wanjik Saleh dalam karyanya, *Hukum Perkawinan Indonesia*, juga menulis apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Secara metodologis, langkah penentu usia pernikahan didasarkan kepada metode *maslahatmursalah*, yakni: *masalah* yang secara eksplisit tidak satu pun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.⁴⁷ Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihad*y, yang sebenarnya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya ketentuan UU Perkawinan tentang batas usia pernikahan, bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, misalnya: calon mempelai wanita

⁴⁶Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), h. 90.

⁴⁷Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 284.

telah dalam keadaan hamil. Harus segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga. Meskipun *masalahmursalah* dapat dijadikan dalil hukum dan *hujjahsyari'ah*, tetapi perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, kriteria yang telah disepakati, hendaknya dipegang teguh dalam aplikasinya dan hal ini harus disadari bahwa hukum itu pekerjaan *mujtahid* yang tidak boleh lepas dari persyaratan yang telah ditentukan para *mujtahid*.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.

3. Batas Usia Minimum Pernikahan

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. An- Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu). Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”⁴⁸ (Q.S. An-Nisa (4):6)

⁴⁸Abdul Aziz Abdul Rauf, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqaha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁹

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh

⁴⁹M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁵⁰

Di dalam syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil *baligh*, oleh karena itu seorang pria yang belum *baligh* belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:⁵¹

- a. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar maskawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan

⁵⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000), h.23.

⁵¹Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.351-352.

perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam ilmu *fiqh*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:⁵²

- a. Menurut ulama Hanafiyah genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual.

⁵²Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994), h. 3-4.

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.

4. Faktor Pendorong Perkawinan di Bawah Umur

a. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya orang tua harus tahu dan paham bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, tuntunan dan pembinaan pada generasi bangsa dengan karakter sesuai cita-cita bangsa dan Negara. Tetapi rendahnya tingkat pendidikan maupun tingkat pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan

anaknya yang masih di bawah umur. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah diambil olehnya. Kalau pernikahan dilakukan di bawah umur 20 tahun, maka secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya.

Kurangnya pendidikan bisa dikarenakan faktor ekonomi, dari faktor ekonomi inilah seseorang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan juga dikarenakan oleh keluarga yang relatif besar. Selain itu faktor social budaya juga mempengaruhi kurangnya pendidikan, pendidikan masyarakat di lingkungan sekitar yang tergolong rendah menyebabkan para remaja malas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁵³

b. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologis seseorang dikatakan sudah memasuki usia remaja yaitu usia 16 atau 17 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Seseorang disebut masa remaja apabila sudah ditandai dengan kematangan seksual dan memantapkan

⁵³Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 182.

identitasnya sebagai individu terpisah dari ketergantungan keluar, mempersiapkan diri menghadapi tugas, menentukan masa depan dan mencapai usia matang secara hukum.

Masa remaja disebut sebagai masa peralihan karena ada peralihan dari masa pubertas menuju dewasa. Peralihan berarti terputusnya atau berubah dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Peralihan berkaitan dengan perkembangan dari setiap tahap. Apa yang pernah tertinggal pada satu tahap akan memberikan dampak ketahap yang berikutnya. Selama periode peralihan, anak remaja banyak mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, atau sosial.

Bentuk fisik remaja yang semakin sempurna dan mirip dengan orang dewasa. Dengan demikian juga perkembangan intelektual, psikis, dan sosial. Dia semakin ingin dapat status, bebas menentukan sikap, pendapat dan minat, ingin menolong dan ditolong orang lain, belajar bertanggung jawab dan pola pergaulannya yang sudah mengarah pada heteroseksual.⁵⁴

c. Hamil sebelum menikah

Faktor ini saya pisahkan dari faktor di atas, karena jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua gadis ini tidak

⁵⁴Herri Zain Pieter, dkk, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 90.

setuju dengan calon mantunya. tetapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.⁵⁵

Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan undang-undang bahkan agama. Karena sudah dapat di bayangkan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan (kehamilan).

d. Faktor Ekonomi

Kita masih menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadisnya akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada orang yang memiutangi. Dan setelah anak itu dikawinkan, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.⁵⁶

⁵⁵Abu Zahlan, *Kawin Usia Muda Antara Citra Islam dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Rindang, 2012), h. 12.

⁵⁶Chadiyah Nasution, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan* (Bandung: Citra Karsa, 2010), h. 84.

Banyak juga orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif atau negatif yang terjadi atas pernikahan anaknya yang masih di bawah umur.

e. Faktor Perintah Orang Tua

Pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang melaksanakan keinginannya untuk mengawinkan anak-anaknya, pada hal usianya masih relatif muda yaitu belum mencapai usia minimal untuk menikah yang diatur dalam undang-undang Perkawinan. Jika anak tidak mempunyai pilihan lain kecuali mematuhi keinginan orang tua. Anak dinikahkan dengan laki-laki yang sama sekali tidak dikenal.⁵⁷

Orang tua kerap kali memaksakan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan untuk kebahagiaan anaknya. Agar tidak menjadi perawan atau perjaka tua. Mereka berasumsi menikah di atas usia ideal adalah aib, sebab ada kekhawatiran turunnya minat pria menikahnya. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur yaitu : Pertama, kurangnya perhatian atau pengertian tentang agama Islam yang menekankan bahwa perkawinan adalah sesuatu

⁵⁷Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Jakarta: Banua Arta, 2009), h. 46.

yang tinggi dan mulia. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, adanya anggapan bahwa perceraian bukan merupakan hal tercela, bahkan ada daerah yang bisa dikatakan kawin-cerai beberapa kali sudah menjadi tradisi dan akan menambah status. Keempat, banyak yang belum mengerti pentingnya pendidikan, dan banyak orang tua yang tidak menyadari dampak negatif perkawinan usia muda terhadap kesalahan ibu dan anak.⁵⁸

5. Alasan Pemberian Dispensasi Nikah

Pernikahan merupakan hal yang pokok dalam menjaga kelangsungan manusia, Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya untuk memelihara dan melanjutkan keturunan.⁵⁹ Sedangkan salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.

Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini, karena tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri

⁵⁸Yulianti, "Praktik Pemberian Dispensasi Nikah". (Skripsi Program S1 Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h.34.

⁵⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 115.

serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna.⁶⁰

Pengadilan Agama merupakan kelengkapan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia yang berhak menangani perkara-perkara bagi orang Islam. Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama haruslah diterima, diperiksa, dan diputus sesuai hukum yang berlaku. Karena dalam perkara dispensasi nikah tidak mengandung sengketa, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mana mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah hakim dengan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin laki-laki yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon pengantin wanita jika belum berumur 16 tahun. Hal ini sesuai dengan UUP No.1 Tahun 1974 pasal 7 (2), yaitu: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan. Artinya jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan calon pengantin laki-

⁶⁰Dadan Muttaqien, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Insania Cita Press, 2006), h. 62.

laki belum mencapai umur 19 tahun, dan calon pengantin belum mencapai 16 tahun maka diperbolehkan mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama (PA).

Ada beberapa faktor orang tua atau wali dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya. Walaupun alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam Undang-undang, namun hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua, apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Alasan Hakim Pengadilan Agama memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah karena tiga hal, yaitu:⁶¹

- a. Alasan Prosedural.
- b. Alasan Kemaslahatan.
- c. Kesiapan Calon Pengantin.

Pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama adalah:⁶²

- a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu

⁶¹Muhammad Baihaqi, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalah". (Skripsi Program S1 Hukum Keluarga UIN Walisongo, Semarang, 2018), h.57.⁶¹

⁶²Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Jakarta, h.102.

membayar panjar biaya perkara yang telah di taksir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama karena masih di bawah umur.
- 4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan.
- 5) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakilkan tempat tinggalnya.

Selanjutnya mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:⁶³

a. Pra Meja

Pemohon sebelum mengajukan permohonan terlebih dahulu pergi ke prameja untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara cara membuat surat permohonan dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat pemohon.

⁶³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.61

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dilihat dan ditandatangani diajukan pada sub panitera pemohon, kemudian menghadap pada meja satu yang akan memberitahu berapa besar biaya perkara dan menuliskan pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besar biaya perkara diperkirakan telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pada pasal 193 RBg atau pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 ayat 1 UUPA yang meliputi:

- 1) Biaya kepaniteraan dan materai.
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara pledeo. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari desa yang dilegalisir oleh camat. Biaya perkara tersebut dapat ditaksir Rp. 0.00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon ke kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Selanjutnya kasir menerima uang tersebut dan mencatatnya dalam jurnal biaya perkara. Selain itu kasir

menandatangani dan memberi nomor perkara tanda lunas pada SKUM kepada pemohon.

d. Meja II

Pemohon menghadap meja dua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian di meja dua pemohon diberi nomor surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja dua membubuhkan paraf. Selanjutnya pemohon diberi satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM.

Kasus hamil diluar nikah merupakan masalah yang serius, jika tidak dicarikan solusinya akan semakin bertambah dari tahun-ketahun. Hakim dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat daripada madharatnya memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil di luar nikah. Biasanya anak tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah dikarenakan usianya yang belum terpenuhi. Usia yang masih belia menjadikan KUA menolak permohonan nikah yang diajukan orang tua atau wali. Maka jalan satu-satunya dengan meminta atau pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Hakim mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang didapat akan lebih banyak jika mengabulkan dispensasi nikah kepada anak

yang hamil diluar nikah daripada menolak atau tidak mengabulkan permohonan. Dasar pertimbangan hakim, yaitu jika menolak permohonan dikhawatirkan psikologi anak akan terganggu karena menanggung beban mental hamil. Selain itu jika tidak dikabulkan dikhawatirkan anak akan nekat melakukan bunuh diri, di samping itu juga memberikan perlindungan calon bayi yang dikandung sehingga mendapat status yang jelas baik nasab maupun dari pemerintah.

Dispensasi bukan hanya diberikan bagi pasangan yang telah hamil atau berhubungan intim saja, tetapi lebih bersifat prosedural dengan mengambil dasar adanya faktor-faktor yang membawa kemaslahatan.

6. Manfaat Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk bagi anak yang masih di bawah umur sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 bahwa “Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”.

Jika demikian, maka dispensasi nikah tidak perlu ditanyakan keabsahannya menurut hukum karena ditetapkan oleh lembaga (pengadilan) yang berkompeten berdasarkan hukum yang berlaku. Jika

dirujuk pada alasan-alasan yang serius yang dijadikan hakim pengadilan memberikan dispensasi nikah seperti: karena hamil di luar nikah, berzina atas dasar pacaran, dan putus sekolah, maka dapat diketahui manfaat-manfaat pemberian dispensasi.⁶⁴

- a. Pria tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya telah diinsyafi bahwa jika melakukan hubungan intim dengan gadis, akibatnya adalah hamil;
- b. Memastikan bahwa anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal sekaligus melegalkan status anak itu sendiri;
- c. Menghentikan hubungan intim diluar nikah (zina) antara pria dan wanita pasangan yang belum hamil;
- d. Pria yang bertanggung jawab tersebut akan aman dari ancaman gangguan dari keluarga si gadis atau masyarakat luas.

C. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang berhasil dikemukakan, di mana skripsi tersebut mengkaji tentang pernikahan di bawah umur. Diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Helma Yuliawati fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul "Problematika Pernikahan Wanita di Bawah Umur Dalam Perspektif *Fiqh Munakahat* (Studi Kasus di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)" dalam karyanya tersebut yang diambil

⁶⁴Marilang, "Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur". (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2018), h.151.

kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur wanita yang sudah mempunyai syarat dan rukun dapat dilangsungkan perkawinannya meskipun perempuan itu di bawah umur. Perkawinan di bawah umur cenderung kepada penyesalan dan perceraian. Kalau ditinjau dari sisi sosial, perkawinan muda dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Apabila untuk seorang wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur dalam hal ini akan menyebabkan kondisi kesehatannya akan terganggu karena ada kalanya rahim sang wanita yang menikah di usia muda itu belum siap untuk dibuahi sehingga akan menimbulkan penyakit pada rahim wanita yang belum siap untuk hamil dan melahirkan.⁶⁵

Kemudian skripsi yang disusun oleh Siti Munawaroh fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*" yang dalam karangannya tersebut ditarik kesimpulan bahwa pernikahan di usia dini terjadi karena pergaulan bebas dan akhirnya terjadi hamil di luar nikah yang menjadi sebab utama melakukan pernikahan di usia dini, yang sehingga dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga. Di samping itu, pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim.

⁶⁵Helma Yulawati, *Problematisasi Pernikahan Wanita di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Studi Kasus Di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang*, 2015.

Dan kualitas atau sumber daya manusia yang rendah juga maka sedikit sekali anak-anak usia sekolah lanjutan yang meneruskan pendidikannya.⁶⁶

Selanjutnya Skripsi Endah Endawati fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Gadis Hamil Yang Belum Menikah di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim"*, yang diambil kesimpulan terdapat suatu adat yang tetap berkembang dan masih sampai sekarang tetap dilaksanakan bagi laki-laki yang menghamili dan wanita yang hamil di luar nikah. Sebelum melakukan pernikahan diadakan pengiringan di perkampungan dan wajib membayar denda satu ekor kambing, dan ini wajib dilaksanakan oleh pasangan tersebut sebagai penebus dosa yang mereka lakukan dan untuk membuang sial. Dengan demikian terlihat jelas adat tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam. Mereka mewajibkan melakukan pengiringan dan membayar denda satu ekor kambing, sedangkan dalam syariat Islam belum ada landasan untuk mewajibkan pengiringan dan berlakunya denda tersebut serta laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah lebih besar hukumnya dari pada gadis dan bujang.⁶⁷

⁶⁶Siti Munawaroh, *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

⁶⁷Endawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Gadis Hamil Yang Belum Menikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelakar Kabupaten Muara Enim Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan belum ada penelitian yang secara khusus membahas dan mengkaji apa yang peneliti maksud, sehingga peneliti berinisiatif untuk menyusun ke dalam sebuah skripsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Hamid Hakim, *Mubadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Daar Al-Qalam, 1984).
- Abu Zahlan, *Kawin Usia Muda Antara Citra Islam dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Rindang, 2012).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Chadijah Nasution, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan* (Bandung: Citra Karsa, 2010).
- Dadan Muttaqien, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Insania Cita Press, 2006).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat Balai Pustaka, Jakarta, 2008).
- Drs. Abdul Aziz, *Buku Dasar Fiqh Munakahat* (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014).

- Hafish Dasuki, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993).
- Herri Zain Pieter, dkk, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Jakarta: Banua Arta, 2009).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005).
- Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002).
- Ph. D. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 2008).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah terj. Abdul Kadir Alfujri, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya: Mutiara ilmu, 1994).
- Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).

Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Artikel & Jurnal

Endawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Gadis Hamil Yang Belum Menikah Di Desa Menanti Kecamatan Kelakar Kabupaten Muara Enim Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Helma Yuliawati, *Problematika Pernikahan Wanita di Bawah Umur Dalam Prespektif Fiqh Munakahat Studi Kasus Di Desa Nagari Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al-Quran dan As Sunnah (On-Line), tersedia di: <http://asysyariah.com>. html (09 Juni 2020).

Marilang, “*Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*”. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2018).

Muhammad Baihaqi, “*Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat*”. (Skripsi Program S1 Hukum Keluarga UIN Walisongo, Semarang, 2018).

Nurmilah Sari, “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur*”. (Skripsi Program S1 Akhwal Syakhsiyyah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Siti Munawaroh, *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Wawang Sanwari, Kepala KUA Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 06 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Jumadi, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Sigit Hermanto, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Bapak Sukarman, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Dewan Saputra, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 11 Maret 2020.

Wawancara dengan May Leni Pratiwi, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 11 Maret 2020.

Wawancara dengan Ustad Suharno, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Novi, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 06 Agustus 2020.

Wawancara dengan Ibu Karni, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 06 Agustus 2020.

Wawancara dengan Vera, Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, 06 Agustus 2020.

Undang-Undang

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Jakarta, 2019.

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Jakarta, 2008.

Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999).